

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Golden Triangle



Gambar 6. Sungai Mekong
Sumber : Kompas.com, 2023

Perdagangan narkoba yang marak terjadi menjadikannya sebuah ancaman jangka panjang terhadap keamanan maritim Asia Tenggara, dalam beberapa tahun terakhir segitiga emas menjadikan tempat produksinya narkoba hanya saja mereka memperluas jalur perdagangan dengan melewati jalur perairan dan menjadikannya pusat perhatian. Salah satu kawasan di Asia Tenggara terdapat wilayah yang dikenal dengan sebutan *Golden Triangle* (Segitiga Emas) dimana 3 negara yang saling berbatasan yakni Laos, Myanmar, Thailand, perbatasan tersebut dikenal sebagai Sungai Mekong, memiliki panjang sekitar 4.350 kilometer yang melintasi perbatasan internasional, sungai yang telah lama dijadikan tempat perpindahan manusia dan barang dengan menggunakan kapal-kapal kecil antar kota. Tidak hanya sebatas itu namun sungai ini merupakan jalur penting arus transit ekonomi diketahui lebih dari 300.000 ton barang dikirim melalui jalur tersebut. Besarnya

peran Sungai Mekong dalam kegiatan ekonomi, pembangunan sosial sehingga terbukanya tindak kriminal dengan memanfaatkan perdagangan narkoba melalui *unofficial crossings* dengan melihat letak yang strategis *Golden Triangle* yang menguntungkan (Rugun, 2018).

Hal tersebut didukung atas peminat yang tinggi dan semakin meningkatnya kapal- kapal yang bekerjasama untuk mengangkut narkoba dengan berat yang besar, diketahui kapal-kapal tersebut berjenis pesiar mewah, perahu pompa yang telah dimodifikasi maka semakin berkembang pula jaringan narkoba. Semakin meluasnya peredaran tersebut mengakibatkan dampak negatif penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang bahkan menimbulkan peningkatan sindikat internasional di wilayah tersebut, memperluas rute-rute maritim yang terlibat.

Kecanduan obat-obatan seperti Indonesia-Malaysia ditambah dari faktor sosial-ekonomi diperkirakan akan terus meningkat terlebih lagi posisi segitiga emas yang strategis untuk melakukan penyelundupan ke kapal semakin membanjiri pasar konsumen. Dibalik perdagangan narkoba yang terjadi adapun dampak yang dirugikan di wilayah tersebut, mereka direkrut oleh sindikat internasional untuk memindahkan narkoba dengan cara menyewa kapal ikan milik nelayan setempat dengan berkedok menangkap ikan. Bahkan nelayan dibayar untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan patroli penegak hukum. Tidak adanya alternatif pendapatan keberlanjutan membuat nelayan masuk ke dalam perdagangan ilegal.

Ekonomi mempengaruhi terjadinya penyelundupan narkoba di suatu negara atau wilayah sebab ada beberapa kondisi yang mendorong individu dan masyarakat untuk mendapatkan omset yang praktis diantaranya 1.) Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi bahwa pendapatan dan kebijakan pembangunan mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang belum merata sehingga seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keterbatasan sistem sosial dan budaya yang menyebabkan kemiskinan semakin berkembang, 2.) Pengangguran yang diakibatkan dari keterbatasan lapangan kerja sehingga mempengaruhi kriminalitas yang semakin tinggi terutama dalam bisnis penyelundupan narkoba dengan nilai yang fantastis. Seiring berkembangnya globalisasi penyelundupan narkoba melalui jalur laut melibatkan nelayan di wilayah setempat hal ini di dasari untuk melancarkan aksi dan monitoring di laut dan darat dari penjagaan aparat di satu pendapatan nelayan yang tidak pasti menjadikan hal tersebut kunci utama untuk ikut dalam kegiatan ilegal demi menghasilkan pundi-pundi secara cepat.

Untuk mendapatkan pemasukan dengan instan dengan cara mengedarkan narkoba sebagai bisnis yang cukup memberikan keuntungan yang besar, sulitnya masyarakat di suatu negara untuk memperoleh pekerjaan sehingga memutuskan untuk menjalankan aksi penjualan narkoba, pengaruh budaya barat sebagai bentuk globalisasi sebagai trend terkini dan letak geografis. Saat ini peredaran sudah menduduki pelosok wilayah tanpa melihat status sosial masyarakat, tidak hanya berasal dari musisi, orang berpendidikan, kalangan pejabat sebab narkoba saat ini memiliki banyak varian jenis dan harga dari termurah hingga termahal maka dari itu siapa saja dapat membelinya (Lukman, 2021).

Omset Hasil Penjualan Narkoba Per Tahun

Tahun	Jenis Narkoba	Berat Satuan	Omset Penjualan
2018	Sabu Metamfetamin	20.7 kg 20.8 kg	10 miliar
2019	Sabu	26 kg	60 juta-1 miliar
2020	Sabu	20.9 kg	52 miliar
2021	Sabu	20.9 kg	52 miliar
2022	Ganja Sabu	791 kg 2,27 kg	110,88 miliar

Sumber : BNN Batam, 2020

Bisnis narkotika yang menjanjikan di pasar internasional membuat keuntungan yang berlipat bagi para pengedar dan produksi meskipun UU terkait narkotika diberlakukan namun tidak mudah menghentikan aksi ilegal para *The Drugs Lords*, semakin ketat keamanan yang dibuat semakin cerdas pula para sindikat dari dalam ataupun luar negeri meluncurkan usahanya, hal ini tidak lepas dari globalisasi yang memudahkan akses antar benua. Beberapa faktor terkait di antaranya 1.) para aparat yang bertugas kurang cermat dan minimnya teknologi deteksi narkoba, perbatasan kecil yang masih dapat diakses sindikat internasional untuk masuk ke wilayah Indonesia, 2.) sulitnya membongkar jaringan narkoba dikarenakan banyak pihak yang berkepentingan, 3.) permintaan yang tinggi dari dalam negeri membuat para sindikat memperkuat laba sebesar-besarnya dan didukung oleh dinamika internet serta teknologi untuk memudahkan pasar terlibat dalam transportasi dan komunikasi (Elyta, 2020).

Produksi narkoba di Asia Tenggara telah ditemukan sejak abad ke-19 yang artinya kegiatan tersebut telah berlangsung cukup lama dimana produksi dan budidaya narkoba jenis opium di kawasan Golden Triangle yakni Laos bagian utara provinsi Phongsaly, bagian barat provinsi Xien Khouang tepatnya di distrik Nonghet dan Xam Nue, Myanmar berada di provinsi Shan di distrik Wa dan Kokang sepanjang perbatasan Myanmar dan Cina, Thailand berada di pegunungan Doi Tung dan Doi Mae Salong di Chiang Rai. Kejahatan maritim di segitiga emas yang terus berlanjut membuat badan penegak hukum terus mengalami gejala-gejala yang baru sebab kesadaran maritim merupakan tanggung jawab yang besar dan perlunya kerjasama dengan pihak yang terkait maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan narkoba. Terutama masyarakat pesisir yang harus didorong untuk membatasi perdagangan dan memberikan informasi seputar jaringan yang mencurigakan di laut. Dengan menyadari keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama maka pendekatan dilakukan dalam memerangi anti narkoba. Maka dari itu, diperlukannya koordinasi yang lebih besar baik pelatihan bersama atau komunikasi web (Asyura, 2023). Nyatanya perdagangan narkoba memainkan peran yang besar selama bertahun-tahun didukung oleh transportasi dari produsen ke wilayah konsumen, peredaran ini tidak pernah mengalami resesi dan penurunan produsen, pelaut yang menjadi kaki tangan para penyelundup profesional tanpa menyadari konsekuensinya, hampir tiap negara melakukan investigasi, penahanan, interogasi (Singh, 2019).

Tabel 3. Tabel Data Narkoba Heroin di 3 Negara

No.	Jenis Narkotika	Negara	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Heroin	Indonesia	1.4 kg	2.2 kg	2.8 kg
2.		Malaysia	3 kg	4.5 kg	2.1 kg
3.		Singapura	58 kg	38.2 kg	72.70 kg

Sumber : ASEAN, 2022

Efek dari penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia tentu menyerang lingkungan masyarakat dari segi ekonomi yang mana setiap saatnya pecandu tentu membutuhkan narkoba sebagai kebutuhan sehari-hari ditambah dengan dosis yang bertambah dibandingkan barang lainnya sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya narkoba adalah komoditi yang sangat menjanjikan meskipun resiko ancamannya cukup berat (Eleanora, 2011). Sementara di Singapura efek penggunaan narkoba lebih diperhatikan pada kalangan muda dimana individu yang berusia 13-34 tahun mempunyai resiko penggunaan lebih tinggi dan kecanduan seumur hidup dengan rata-rata usia pemula adalah 19,6 tahun diantara 28% pengkonsumsi telah melakukan jauh dibawah umur dengan kekhawatiran tren global pemakaian narkoba yang merajalela dibawah usia 18 tahun dengan faktor lingkungan pertemanan, pengawasan keluarga, mencari hal-hal baru dan efek sosial media, digital ditambah dengan kehadiran e-commerce yang sulit dihambat pada praktik dagang narkoba (Teo, 2024).

Peredaran narkoba di segitiga emas semakin kuat yang juga melibatkan jaringan internasional. UNODC memprediksi, total regional pasar heroin di segitiga emas mencapai 8,7-10,3 miliar dollar AS per tahun. Belum ditambah produksi metamfetamin biasa dikenal dengan sabu dengan rata-rata omset per tahunnya mencapai 30,3-61,4 miliar AS, diketahui bahwa sabu merupakan jenis narkoba yang sangat diminati sehingga menggeser minat heroin, jika dilihat dari posisi utara Malaysia yang berseberangan langsung dengan Thailand sebagai pemasok dari segitiga emas ke Malaysia. Pada tahun 2021, disitanya sabu-sabu seberat 36,3 kilogram yang sebelumnya sempat melewati Malaysia lalu masuk ke Indonesia dan ekstasi sebanyak 10.000 butir, Singapura yang menyita narkoba dengan jumlah nominal sebesar 16,66 juta dolar Singapura yakni penyitaan heroin 68,22 kg, ganja 133,41 kg dan metamfetamin 28,15 kg (CNB Annual Statistic, 2022).

Dalam kasus ini penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang dipandang serius oleh pemerintah dikarenakan dapat merusak moral bangsa. Kota Batam secara geografis memiliki posisi dengan tata letak yang strategis karena berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Dengan kondisi yang bersebelahan dengan negara tetangga memudahkan akses untuk melakukan perdagangan internasional namun resiko dari keterbukaan pintu masuk meningkatnya kejahatan penyelundupan narkoba yang kerap terjadi di wilayah perairan (Murni, 2018). Peluang bagi para pengedar internasional memanfaatkan kesempatan dengan melihat lengahnya penjagaan di perairan Batam, jalur-jalur kecil yang kurang ketat dalam penjagaan oleh aparat penegak hukum. Faktor utama dari pengguna narkoba di Kota Batam yang tinggi jika dikalkulasikan per individu menghabiskan Rp.500.000 dalam satu bulan, dengan begitu motif utama pengedar ialah

penghasilan yang didapat dengan nominal yang fantastis (Bobby, 2021). Kategori penyesuaian dalam meminimalisir aksi penyelundupan yang sering terjadi di wilayah perairan yang dapat dilakukan :

- a.) Perumusan dan pelaksanaan yang strategis akan menilai keefektifan organisasi, lembaga, perbaikan struktur dan pengembangan sumber daya dalam mengantisipasi masalah yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional pasalnya jalur-jalur kecil di perairan Indonesia yang memudahkan akses masuk sindikat dari luar negeri menjadi tanggung jawab sehingga implementasi koordinasi dan komunikasi antar lembaga ditingkatkan bersama stakeholder secara rutin atau kegiatan khusus, peran masyarakat dimana masyarakat melakukan patroli patok batas dan penyuluhan dengan menjaga perbatasan negara tidak dapat dilakukan dengan sendiri sehingga ada keterlibatan negara lain yang berbatasan langsung. Implementasi strategis yang telah direncanakan sebagai wujud untuk memerangi masuknya narkoba ke Indonesia maka pimpinan organisasi melaksanakan tindak manajemen yang mengarah pada pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya yang maksimal meskipun perlu ditingkatkan lagi dengan mengawasi pergerakan distribusi obat-obatan ilegal.
- b.) Evaluasi dengan mengukur sejauh mana kerjasama internasional menghasilkan manfaat yang dapat dilihat dari persentasi masuknya narkoba apakah bertambah atau berkurang atas narkoba yang diselundupkan melalui perairan Indonesia (Alamsyah, 2023).

2.2 Kasus Penyelundupan Narkoba di Perairan Batam

Menurut Fella Alum (2012) *Trans Organized Crime* di kawasan Asia Tenggara terjadi dikarenakan memiliki banyak wilayah kemiskinan di antara kekayaan sehingga memotivasi berbagai bentuk ancaman kejahatan terorganisir dimana juga terjadi korupsi yang memfasilitasi serta peran elit yang mempengaruhi hal tersebut. Sejumlah “pusat” wilayah Asia Tenggara menjadikan tuan rumah seperti persimpangan transportasi, tempat pelaku tinggal, bertemu, bertransaksi (perencanaan, pencucian uang, penyediaan dokumen palsu) sehingga Asia Tenggara masih belum bisa mengimbangi kejahatan terorganisir yang semakin pesat, selain itu faktor upah yang rendah diberikan ke pemerintah dan polisi mendorongnya untuk melakukan bisnis ilegal dengan pebisnis yang lebih kaya sehingga dapat menyuap Bea Cukai, Imigrasi, polisi dan dapat mempengaruhi sistem hukum yang lemah.

Free Trade Zone yang ditetapkan dalam UU. No. 36 Tahun 2000 dan diubah menjadi UU. No. 44 Tahun 2007 dan PP No. 2 Tahun 2009 terkait kepabeanan, perpajakan cukai atas masuk dan keluarnya barang di kawasan perdagangan bebas dari segi industri, ekspor-impor, investasi yang berhubungan dengan perekonomian oleh badan khusus pemerintah Batam sesuai kewenangan yang diberikan (Putra, 2021) namun dibalik penerapan Free Trade Zone tersebut adanya kemiskinan yang terjadi akibat produk lokal yang tidak dapat bersaing dengan produk luar yang diselundupkan secara tidak sah harga produk luar yang lebih murah ketimbang produk domestik, wilayah kecil yang sulit dijangkau sering terlambat kedatangan bahan pokok sehingga lebih memilih mengambil dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia melihat jarak yang dekat dan lebih mudah diakses, maka dari itu Free Trade Zone tidak selalu menguntungkan ekonomi di Batam tetapi

banyak tindakan ilegal yang justru merugikan ekonomi Batam dan Indonesia.

64 titik pelabuhan tikus termasuk juga pelabuhan resmi di dalam kasus trafficking Batam dijadikan tempat transit yang nantinya barang selundupan akan dikirim ke Hongkong, Jepang, Korea, Australia, Timur Tengah, seperti contoh Bank Indonesia yang membantu penelusuran bersama polisi atas rekening tersangka pemilik pabrik sabu-sabu di Batam, menurut Direktur IV narkoba dan kejahatan terorganisir Mabes Polri, brigadir Jenderal (pol) Indradi Thanos bahwa pemilik pabrik sabu-sabu di Batam diduga melakukan praktik pencucian uang dengan membuka usaha ilegal, berikut data-data yang diambil dari berita terkait penyelundupan narkoba di Batam (Susanto, 2019).

Keterlibatan nelayan juga menjadi faktor pendorong penyelundupan narkoba terutama dari segi ekonomi dengan keterbatasan tersebut sindikat mengiming-imingi dengan bayaran yang fantastis, kurangnya diversifikasi ekonomi di wilayah pesisir maka jika ada kesempatan yang lebih besar mereka akan mengambilnya, keterjebakan dalam hutang-piutang baik untuk meminjam peralatan atau kapal, sebagian besar nelayan hidup dalam ketergantungan dari tangkapan ikan sementara dengan tawaran dari sindikat tentu jarang ada yang menolak meskipun tindakan tersebut dianggap ilegal namun untuk mendapatkan keuntungan dengan instan tentunya nelayan akan tergiur meskipun para nelayan mengetahui jika pekerjaan tersebut besar resiko untuk tertangkap, kehilangan pekerjaan (Kompas.com, 2018).

Tabel 4. Data Narkoba 5 Tahun Berturut

Tahun	Jumlah Kasus	Satuan Narkoba
2018	57 kasus	2,932 ton
2019	84 kasus	2,9 ton
2020	806 kasus	6,7 ton
2021	760 kasus	3,31 ton
2022	851 kasus	1,06 ton - 1094 ton

Sumber : BNN RI, 2021

Berkembangnya arus globalisasi dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan transformasi dalam hubungan antar negara dengan berkembangnya teknologi, informasi dan sumber daya manusia lintas batas Indonesia ialah hal yang biasa. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, kepulauan yang besar serta perairan yang luas sebagai jalur maritim, akibatnya banyak kapal asing yang masuk secara ilegal (Sineri, 2023).

Satu diantaranya adalah penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1 ton yang dibungkus dalam bentuk karung terjadi di perairan Batam, Kepulauan Riau. Penangkapan Kapal Sunrise Glory pada 7 Februari 2018 dilakukan tim gabungan TNI, tim bea cukai, dan lembaga lain yang bersangkutan, empat awak kapal yang merupakan tersangka ditangkap. Komandan Kapal KRI-Sigurot 864 mayor laut Arizona bintanga sedang beroperasi dalam pengawasan perbatasan RI-Singapura 2018, adanya kecurigaan tim TNI yang menyadari pergerakan MV Sunrise Glory di perairan Selat Philips pada koordinat 01.08.722 U/103.48.022 T. Melintasnya Sunrise Glory di luar garis *traffic separation scheme* (TSS) menerobos Perairan

Indonesia dengan mengibarkan bendera Singapura. Pada saat pemeriksaan lebih lanjut tidak ada data dokumen yang lengkap dan diketahui semua dokumen dari hasil pengecekan palsu. Kapal ini juga dinobatkan berbendera ganda karena diduga mempunyai nama Sun De Man 66 (Banjarmasin.post, 2018).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau dari website resmi menyatakan bahwa Asia Tenggara adalah produsen narkoba yang di ekspor ke Eropa, Amerika Utara, negara Asia lainnya. Lalu 80% untuk peredaran di Indonesia penyelundupan dilakukan melalui jalur laut. BNN Kepulauan Riau menerbitkan berita Kompas.com 2018 yang menjabarkan jika para pelaku perdagangan penyelundupan narkoba masuk ke wilayah perairan Indonesia menggunakan kapal asing (kapal ikan). Pada Masa Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, petugas aparat di Pelabuhan Kepulauan Riau berhasil menangkap 4 kapal asing pada bulan Februari tahun 2018 dimana pelaku membawa narkoba dalam jumlah yang besar untuk diedarkan di Indonesia. Lalu pada tahun berikutnya 2021, Polda Riau menahan pelaku pengedar yang mempunyai narkoba seberat 23 kilogram dan 19 butir pil ekstasi dari Malaysia. Maka dari itu kasus-kasus penyelundupan kerap terjadi di Kepulauan Riau sebab wilayah perairan yang luas dan sangat dekat dengan perbatasan perairan dengan negara tetangga, akibatnya banyak pelabuhan tradisional yang biasa difungsikan pelaku kejahatan untuk memperlancar aksinya (Oktaviani, 2022).

Begitu juga tim yang memeriksa tidak menemukan alat tangkap ikan sebagaimana diketahui bahwa kapal tersebut ialah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di perairan Taiwan. Tahun 2017 kapal Sunrise Glory sudah

menjadi Target Operator (TO) pada sekitar bulan November petugas BNN mendapatkan informasi yaitu ada kapal ikan Taiwan bernama MV Stun De Man 66 diduga mengirimkan narkoba jenis sabu sebanyak 1,2 ton tujuan Australia melewati jalur Indonesia yang sebagian sabu tersebut akan diturunkan di wilayah Indonesia. Pihak BNN sempat melakukan koordinasi dengan pihak Australia Federal Police (AFP) pada tahap berikutnya Indonesia membentuk tim gabungan BNN, TNI AL, Bea Cukai untuk mendeteksi pergerakan MV Stun De man 66 khususnya di perairan pantai barat Sumatera, tepatnya pada 10 Desember 2017 terdeteksi kapal berada di perairan Selat Andaman, perairan pantai barat Sumatera, diduga kapal akan menuju Samudera Hindia kemudian perairan Australia. Dugaan tersebut terbukti pada tanggal 21 Desember 2017 Australia Federal Police memberikan informasi ke BNN dengan menangkap kapal The Valkoista yang membawa sabu seberat 1,2 ton, di perairan Australia, 250 mil dari pantai Perth, Australia yang diduga berasal dari kapal MV Stun De Man. Kemudian terdeteksi pada tanggal 28 Desember 2017 kapal berada di pelabuhan Jurong, Singapura dan meninggalkan pelabuhan pada tanggal 29 Desember 2017 menuju perairan Andaman, India (Prasetio, 2018)

2.3 Kerjasama Indonesia-Singapura Terkait Kejahatan Transnasional

Dalam Perdagangan Narkoba

Kejahatan transnasional ASEAN yang cukup tinggi terkait narkoba, merupakan fenomena yang menjadi sebuah tantangan terutama di Asia Tenggara, kawasan ini memiliki perdagangan narkoba terbesar yang dinamakan Golden Triangle, kejahatan narkoba juga disebut sebagai kejahatan luar biasa

(*extraordinary crime*) yang berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara massif (Hatta, 2019). Mengetahui urgensi dan konsensus akan hal itu, organisasi ASEAN membentuk *Asean Drugs Expert* (ADE) pada tahun 1976 sebagai sub-komite yang mempunyai tugas untuk menangani lintas batas narkoba, seiring berjalannya waktu *Asean Drugs Expert* (ADE) berganti nama menjadi *Asean Senior Officials On Drugs Matters* (ASOD) pada tahun 1984 (Asean, 2022). *Asean Senior Officials On Drugs Matters* (ASOD) sebagai wadah untuk menangani kasus penyalahgunaan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba dan senjata, sea-piracy dan diharapkan dapat melindungi keamanan negara ASEAN dari ancaman narkoba selain itu dalam memerangi permasalahan yang sedang dihadapi agenda ini tertuang dalam “*ASEAN Work Plan Combating Illicit Drugs Production, Trafficking and Use*”. Perkembangan kasus narkoba di Asia Tenggara direpresentasikan ke dalam “*ASEAN Drug Monitoring Report*” (Laporan Pengawasan Narkoba Asean) yang disatukan tiap tahunnya untuk mendeteksi gerakan ilegal narkoba di negara kawasan ASEAN sehingga sangat berfungsi bagi ASOD ASEAN untuk melihat perkembangan suatu kebijakan di tiap negaranya terhadap narkoba. Masalah tentang kejahatan lintas batas negara dalam hal perdagangan dan penyalahgunaan narkoba sudah sejak lama dianggap fundamental bagi ASEAN yang dilakukan kurang lebih dalam kurun waktu dua dekade yang terwujudkan dalam Joint Declaration For A Drug-Free ASEAN di tahun 1998 (Rizal, 2023).

Dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menandatangani Perjanjian terkait kerjasama Pertahanan (*Agreement between the*

Government of Republic Indonesia and the Government of Singapore On Defence Cooperation) pada 27 April 2007 Tampak Siring, Bali, Indonesia. Usulan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 terkait pengesahan perjanjian antara pemerintah kedua negara yakni Indonesia dan Singapura yang disebutkan dalam Pasal 1. Menindaklanjuti hal tersebut, salinan naskah asli Persetujuan Kerjasama Bidang Pertahanan yang dibuat ke dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, meliputi :

- a. Rapat dan merundingkan kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu keamanan
- b. Pertukaran informasi intelijen termasuk bidang penanganan terorisme
- c. Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan dengan pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, saling memberikan informasi termasuk dalam perkembangan proyek yang telah disetujui
- d. Peningkatan sumber daya manusia dari lembaga pertahanan dan militer melalui pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya
- e. Bersama-sama maupun masing-masing menjalankan latihan dan pelatihan, operasi bersama, dukungan kedua militer termasuk akses wilayah latihan serta fasilitas tertentu
- f. Search and rescue dan bantuan manusia serta operasi pemulihan bencana wilayah

Bagan Kerjasama BNN Indonesia - CNB Singapura



Dalam menghadapi kejahatan transnasional, Indonesia termasuk negara yang cenderung rentan sebab letak negara Indonesia yang strategis khususnya di segitiga emas. Oleh karena itu Indonesia meratifikasi pengesahan United Nations Conventions On Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2009 yang menyebutkan kategori kejahatan-kejahatan lintas batas negara untuk memerangi kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba yang memberikan implikasi negatif kepada Indonesia. Indonesia berpendapat narkoba adalah sebuah ancaman yang berdampak kepada kehidupan bangsa Indonesia, dapat mengganggu ketahanan nasional aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dengan melihatnya negara produsen berasal dari banyak negara maka Indonesia sadar akan pentingnya bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan diskusi terkait perang pada narkoba sebagaimana Indonesia juga salah satu negara tujuan narkoba hingga menyatakan negara sedang dalam gawat darurat (Aditya, 2017).

Tidak jauh berbeda dari Indonesia, Singapura yang perlunya melakukan kerjasama dengan melibatkan aparat-aparat negara terutama yang berhubungan

dengan narkoba, Singapura juga meningkatkan respon tindakan yang harus dibuat sehingga kemungkinan pihak CNB mempunyai wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktifitas-aktifitas kejahatan narkoba. Untuk mencegah aliran narkoba, CNB berusaha keras untuk bekerjasama dengan negara lain dengan pertukaran informasi, membentuk kerjasama gabungan dengan mitra internasional Singapura berharap narkoba tidak lagi masuk ke negaranya. Berikutnya, Singapura juga bekerjasama dengan otoritas imigrasi yakni ICA dan SPF agar lebih memperketat aturan masuk ke Singapura, CNB juga melakukan pemeriksaan di darat secara berkala. Singapura dengan tegas menyatakan tidak akan lengah dalam memberantas narkoba, begitupun CNB yang akan meningkatkan fasilitas deteksi narkoba, intelijen, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat agar Singapura terbebas dari narkoba (AIPA.com, 2023).